



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2024

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA**



TAHUN 2023

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT Rencana Kerja (Rencana Kerja) tahun 2024 yang memuat Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan RENJA ini pula Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Program serta Pemantapan Kinerja sebagai tuntunan dalam melaksanakan berbagai aktivitas Pemerintahan dan Pembangunan.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah Tatanan Kehidupan Masyarakat yang damai dan didukung roda pemerintahan yang baik, sehingga terciptanya pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat/daerah.

Untuk itulah dalam rangka pemberian pelayanan prima terhadap masyarakat, program dan kegiatan Badan Kesbang dan Politik Kota Samarinda dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) ini.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA,



SUCIPTO, SPd, M.Si.

NIP. 19670319 199702 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan	4
1.4.Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	16
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya OPD	24
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD	38
3.3. Program dan Kegiatan (Tabel Pendanaan Indikatif tahun 2024)....	39
BAB IV PENUTUP	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah untuk meningkatkan sistem evaluasi capaian kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Pelaksanaan program-program, kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini dapat dijadikan bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan setiap usulan anggaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap SKPD.



Dengan demikian apa yang menjadi Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran dapat memberikan kepuasan kepada publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal pemberian pelayanan prima kepada masyarakat merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda di susun atas dasar undang-undang dan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 10 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang.
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
5. Permendagri No 18 Th 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman fasilitasi Pendidikan Politik;
8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Kepmendagri 1317 2023 Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 nomenklatur program kegiatan per 23 Juni 2023;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 tanggal 5 Juli Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
19. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 tanggal 31 Juli Tahun 2023 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
20. Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor : 050-05/024/HK-KS/I/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;
21. Surat Edaran Wali Kota Nomor : 000.7.2.4/0636/300.01 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
22. Rencana Strategis Perubahan 2021-2026;



1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen Perencanaan Kinerja SKPD yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
2. Bahan evaluasi untuk program dan kegiatan tahun berikutnya.
3. Tersusunnya program dan kegiatan sebagai bahan Rencana Kinerja Anggaran sesuai dengan kebutuhan SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja SKPD yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan, sehingga Substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

- a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 beserta hasil pencapaiannya memuat penetapan indikator kinerja, evaluasi program dan capaian Renstra SKPD.
- b. Analisis kinerja pelayanan SKPD.
- c. Isu-isu penting penyelenggaraan TUPOKSI SKPD berisikan uraian mengenai isu-isu yang berkembang, hambatan yang dihadapi, dampak terhadap visi dan misi kota Samarinda serta tantang dan peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda.
- d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- e. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dalam bagian ini menguraikan rencana sub kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik kota Samarinda ke masyarakat langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.



- 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda mengungkapkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang ingin di capai dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda tahun 2023.
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024. Menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan diusulkan tahun 2024.

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja pada Tahun 2022 dan Capaian Renstra Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menerima anggaran sebesar **Rp 10.429.874.335 ,- (sepuluh milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 9.760.356.197,- (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah)** (93,58%) dari jumlah dana tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan 5 (lima) program, 5 (lima) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan :

- 1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- 2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

2 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,



Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- 2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

4 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- 2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah



5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 3 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (2022) sampai dengan triwulan IV merupakan capaian kinerja RENSTRA yang bertujuan untuk mengukur kemampuan SKPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja pada tahun 2022 sampai dengan triwulan IV sebagai berikut :

- 1 Untuk tahun 2022 pencapaian kinerja pada Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dapat dicapai 98,87%.

Juga pada sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dapat dicapai 99,14%

- 2 Untuk tahun 2022 pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan



Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dapat dicapai 99,97%.

Juga pada Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dapat dicapai 99,95%.

- 3 Untuk tahun 2022 pencapaian kinerja pada Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah tercapai 100% karena minimnya dana APBD.

Juga pada sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dapat dicapai 100%

- 4 Untuk tahun 2022 pencapaian kinerja pada Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dapat dicapai 95,13%

Juga pada sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan



Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dapat dicapai 93,84%

- 5 Untuk tahun 2022 pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dapat dicapai 99,59%

Juga pada sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dapat dicapai 99,46%

Dan pada sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bidang dapat dicapai 87,83%

Secara umum program/kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sampai dengan Tahun Anggaran 2022 berkinerja baik, hal ini terlihat pada realisasi penyerapan anggaran untuk Belanja Langsung, dalam hal ini penyerapan pada program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 mencapai hingga 98.90%, diharapkan keberhasilan pencapaian target kinerja menjadi maksimal juga untuk capaian terhadap hasil (outcome) untuk setiap program/kegiatan. Selanjutnya diharapkan keberhasilan kinerja di Tahun Anggaran 2023 dapat mencapai 100% baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Capaian realisasi target Renstra hingga tahun 2022 berdasarkan pelaksanaan Renja Tahun 2022 diperkirakan sesuai dengan target masing-masing yaitu pencapaian target dari seluruh program dan kegiatan. Adapun uraian terkait pencapaian dari setiap program serta rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :



Tabel 2.1
Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Capaian	Persentase (%)
			Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	1.143.738.000	1.131.114.712	98,90%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.143.738.000	1.131.114.712	98,90%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.038.464.000	1.026.748.912	98,87%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	105.274.000	104.365.800	99,14%
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	3.047.815.335	3.041.532.764	99,79%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	3.047.815.335	3.041.532.764	99,79%



No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Capaian	Persentase (%)
			Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.923.325.335	2.917.105.259	99,79%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	124.490.000	124.427.505	99,95%
3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	103.706.000	103.705.000	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Org. Kemasy.	Jumlah Ormas yang dibina	103.706.000	103.705.000	100%
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	69.567.000	69.567.000	100%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	34.139.000	34.138.000	100%



No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Capaian	Persentase (%)
			Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	723.252.000	681.952.799	94,29%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	723.252.000	681.952.799	94,29%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	251.130.000	238.910.800	95,13%
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	472.122.000	443.041.999	93,84%
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	5.411.363.000	4.802.050.922	88,74%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	5.411.363.000	4.802.050.922	88,74%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	257.599.000	256.534.014	99,59%



No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Capaian	Persentase (%)
			Nilai (Rp.)	Nilai (Rp.)	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	165.162.000	164.262.000	99,46%
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4.988.602.000	4.381.254.908	87,83%

- Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya maupun melebihinya dari target kinerja program/kegiatan adalah.

1. Tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

- ✓ Adanya penetapan jenis target kinerja dan jumlah volume yang kurang tepat, dimana dalam realisasi pelaksanaannya jenis dan volume yang dihasilkan berbeda, sehingga menyebabkan ada ketidaksesuaian antara target dengan realisasi.

2. Terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

- ✓ Pelaksana kegiatan memiliki perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan.
- ✓ Adanya koordinasi dan pemahaman tugas yang bagus dalam pelaksanaan program/kegiatan, hingga pelaksanaannya bisa terarah dan relevan antara target dan pagu anggaran yang tersedia.
- ✓ Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung yang selaras dengan usaha pencapaian target masing masing kegiatan.

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Setelah ada penyesuaian target dan anggaran tentunya akan ada implikasi pada pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran sesuai yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kerja maupun Rencana Strategis.

Namun pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditangani oleh bidang teknis dampak atau implikasinya akan jauh terasa. Pada tahun 2022 ada beberapa kegiatan yang tidak bisa mengakomodir target kinerja sesuai dokumen Renstra maupun dokumen Renja karena beberapa faktor alasan, dan umumnya karena disebabkan keterbatasan pagu anggaran yang diberikan pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sehingga mengharuskan adanya penyesuaian target dan anggaran pelaksanaan kegiatan, ditambah lagi ada rasionalisasi anggaran yang menyebabkan semua SKPD dilingkup Pemerintah Kota Samarinda dipotong anggaran belanja satuan kerjanya, yang tentunya hal ini berakibat pada semakin rendahnya kemampuan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam dokumen Renstra maupun di dalam Renja SKPD.

- Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan dan tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi beberapa faktor diatas antara lain :

1. Setiap pelaksana kegiatan atau penyusun rencana kegiatan mengetahui dan memahami dengan jelas dan detil terkait dasar dan tujuan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga pada saat membuat atau menentukan indikator dan target kinerjanya bisa tepat, akurat dan rasional yang kedepannya akan mempermudah disaat proses penjabaran ke dalam kegiatan (penyusunan rincian belanja).
2. Ada komitmen dari bidang sebagai pelaksana kegiatan, agar saat proses penyusunan dokumen perencanaan yang sifatnya turunan mereka tetap berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada.
3. Perlu ada jaminan kepastian dalam penetapan/pemberian pagu anggaran kepada SKPD, sering terjadi keadaan di SKPD dimana target kinerja dan



anggaran dalam suatu dokumen berbeda dengan target dalam dokumen turunannya, karena ternyata pagu anggaran yang dikucurkan pada SKPD oleh Pemerintah Kota jauh lebih kecil dari pagu yang diminta atau ditargetkan oleh SKPD, sehingga mau tidak mau perlu ada pengurangan target dan anggaran dalam penyusunan program dan kegiatan. Dalam hal ini karena sangat terkait dengan adanya peningkatan atau penurunan pendapatan dan belanja dalam APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan, dan kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda juga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sehingga untuk menilai kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menilai berdasar capaian indikator program sebagaimana dicantumkan dalam tabel dibawah :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

No.	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Akip			80,2	80,2	80,4	80,5	80,2	80,2	80,4	80,5	Realisasi 2022 & Proyeksi 2024 & 2025 mencapai target
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Laporan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	65 orang/bulan	65 orang/bulan	65 orang/bulan	65 orang/bulan	65 orang/bulan	65 orang/bulan	65 orang/bulan	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	40 dokumen	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	
	Jumlah Pegawai			105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 stel	90 Stel	100 Stel	100 Stel	90 stel	90 Stel	100 Stel	100 Stel	
			Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	20 orang	20 orang	-	-	20 orang	20 orang	
	Jumlah laporan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	

No.	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	Realisasi 2022 & Proyeksi 2024 2025 mencapai target
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-	-	3 Paket	3 Paket	-	-	3 Paket	5 Paket	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	4 Laporan	4 Laporan	-	-	4 Laporan	4 Laporan	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20 Laporan	25 Laporan	30 Laporan	12 Laporan	20 Laporan	25 Laporan	30 Laporan	
	Laporan rencana kebutuhan barang			-	-	3 Laporan	3 Laporan	-	-	3 Laporan	2 Laporan	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	-	2 Unit	2 Unit	-	-	2 Unit	2 Unit	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	1 Unit	-	-	-	1 Unit	-	
			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	12 Unit	12 Unit	-	-	-	-	
	Laporan Penyediaan Jasa			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	12 Laporan	12 Laporan	-	-	12 Laporan	12 Laporan	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	
			Jumlah Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bukti pembayaran	12 bukti pembayaran	12 bukti pembayaran	12 bukti pembayaran	12 bukti pembayaran	12 bukti pembayaran	12 bukti pembayaran	12 bukti pembayaran	

No.	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	-	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Realisasi 2022 & Proyeksi 2024-2025 mencapai target
	Laporan Pemeliharaan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	
			Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	
2	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	500 Orang	700 Orang	1000 Orang	1200 Orang	500 Orang	700 Orang	1000 Orang	1200 Orang	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	894 Orang	700 Orang	1200 Orang	1300 Orang	894 Orang	700 Orang	1200 Orang	800 Orang	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	

No.	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0	0	4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	4 Dokumen	4 Dokumen	Realisasi 2022 & Proyeksi 2024 2025 mencapai target
			Jumlah Paskibraka	0	0	300 Orang	300 Orang	0	0	300 Orang	300 Orang	
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	0	0	44 Orang	44 Orang	0	0	44 Orang	40 Orang	
3	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1100 Orang	3800 Orang	1000 Orang	1200 Orang	1100 Orang	3800 Orang	1000 Orang	1200 Orang	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	10 dokumen	
			Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1125 Orang	2450 Orang	10000 Orang	2000 Orang	1125 Orang	2450 Orang	10000 Orang	2500 Orang	

No.	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Realisasi 2022 & Proyeksi 2024 2025 mencapai target
4	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan		Jumlah Ormas yang dibina	11 Ormas	23 Ormas	25 Ormas	45 Ormas	23 Ormas	25 Ormas	45 Ormas	45 Ormas	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	500 Orang	600 Orang	600 Orang	300 Orang	500 Orang	600 Orang	600 Orang	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	23 Laporan	30 Laporan	40 Laporan	50 Laporan	23 Laporan	30 Laporan	25 Laporan	50 Laporan	
5	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke		Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	30 Laporan	35 Laporan	40 Laporan	45 Laporan	30 Laporan	35 Laporan	40 Laporan	45 Laporan	

No.	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
	Agamaan		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	325 Orang	570 Orang	600 Orang	600 Orang	325 Orang	570 Orang	600 Orang	600 Orang	Realisasi 2022 & Proyeksi 2024 2025 mencapai target
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	20 Laporan	25 Laporan	30 Laporan	3 Laporan	20 Laporan	25 Laporan	30 Laporan	
6	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti		Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	24 kasus	24 kasus	24 kasus	24 kasus	24 kasus	24 kasus	24 kasus	24 kasus	
			Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	750 Orang	100 Orang	1500 Orang	300 Orang	750 Orang	1000 Orang	1500 Orang	

No.	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	23 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	23 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	Realisasi 2022 & Proyeksi 2024 2025 mencapai target
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis yang menjadi dasar atau acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2021-2026) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan pada masyarakat, pelajar dan mahasiswa.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam mencegah dan mendeteksi dini terhadap semua potensi konflik di daerah.
3. Meningkatkan pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat.
4. Peningkatan peran daerah dalam mendukung upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Ada beberapa permasalahan / tantangan dan Peluang/solusi yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samaarinda dalam hal kinerja pelayanan. Permasalahan yang ada antara lain :

1. Tenaga aparatur/SDM yang masih kurang memadai.
2. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan masih sangat terbatas.



3. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
4. Perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) dan terjadinya mutasi aparatur dapat menghambat proses kerja.

Tantangan untuk meningkatkan dalam pelayanan :

1. Pertambahan penduduk yang sangat cepat sehingga kesulitan memonitor aktifitas masyarakat secara optimal.
2. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik masih kurang.
3. Kesenjangan ekonomi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial
4. Letak wilayah Samarinda seperti daerah pegunungan dapat menghambat dalam memantau kegiatan masyarakat.
5. Penegakan hukum terhadap pelanggar hukum masih tebang pilih.
6. Pembangunan daerah kurang memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang bisa menimbulkan konflik di masyarakat.

Adapun peluang/solusi yang didapat sebagai berikut :

1. Adanya peluang dukungan dana yang bersumber dari APBD Propinsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Dukungan partisipasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ORMAS, OKP, LSM serta mahasiswa dan pelajar dalam pelaksanaan pembinaan dibidang kesbangpol.
3. Adanya keterkaitan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2021 – 2026.
4. Terbentuknya Forum Komunikasi Dini Masyarakat (FKDM) dalam mengantisifasi kerawanan-kerawanan konflik sosial di masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Renja RKPD

Review terhadap Rancangan Rencana Kerja RKPD tahun 2023 merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta rencana pagu indikatif dalam Rencana Kerja perlu ditinjau kembali sebelum ditetapkan dalam RKPD.

Berikut Review terhadap Rancangan Rencana Kerja RKPD Tahun 2024

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sebelum Rasionalisasi (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sesudah Rasionalisasi (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10 Kecamatan di Samarinda	Nilai IKM	76,6%	14.131.214.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10 Kecamatan di Samarinda	Nilai IKM	76,7 nilai	8.135.906.856	Usulan Anggaran di Rasonali sasi
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akip	80,3	106.090.000	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akip	80,4 nilai	200.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	100.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	36.090.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	20.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	12 Laporan	11,250,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	12 Laporan	7.287.605.266	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang	10,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ bulan	6.215.320.024	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sebelum Rasionalisasi (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sesudah Rasionalisasi (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Kecamatan di Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 d	1,200,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Kecamatan di Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dok	1.022.285.242	Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	12 Laporan	524.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	12 Laporan	481.030.840	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	5.999.100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	200.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	17.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	24.651.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	35.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	42.999.740	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	195.381.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sebelum Rasionalisasi (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sesudah Rasionalisasi (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Kecamatan di Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Kecamatan di Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	49.070.000	Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	30.900.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10 Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10 Laporan	18.170.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	132.500.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	98.200.750	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	65.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	44.706.750	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	12 Unit	7.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	28.494.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sebelum Rasionalisasi (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sesudah Rasionalisasi (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	25%	2.718.270.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	25%	2.718270.000	Usulan Anggaran di Rasionali sasi
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	700 orang	2.718.270.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	700 orang	2.718270.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	506.090.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	506.090.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	112.180.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	112.180.000	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 Dokumen	1,800,000,000	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 Dokumen	1,800,000,000	
	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	300 Orang	200,000,000	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	300 Orang	200,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sebelum Rasionalisasi (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sesudah Rasionalisasi (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	44 Orang	100,000,000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	44 Orang	100,000,000	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100%	4.553.778.171	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100%	53.943.679.550	Usulan Anggaran di Rasonali sasi
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	3800 orang	4.553.778.171	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	3800 orang	53.943.679.550	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dok	2.115.145.335	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dok	50.913.097.550	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sebelum Rasionalisasi (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sesudah Rasionalisasi (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4000 orang	2.332.542.836	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4000 orang	1.517.874.000	Usulan Anggaran di Rasionali sasi
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5 Laporan	106.090,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5 Laporan	1.512.708.000	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	14,63%	84.872.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	14,63%	345.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sebelum Rasionalisasi (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sesudah Rasionalisasi (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang dibina	11 Ormas	84.872.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang dibina	11 Ormas	345.000.000	Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	42.436.000	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	220.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Laporan	42.436.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Laporan	125.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	35%	527.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	35%	1.283.500.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	30 Laporan	527.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	30 Laporan	1.283.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sebelum Rasionalisasi (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sesudah Rasionalisasi (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	760 Orang	263.500.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	760 Orang	263.500.000	Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16 Laporan	263.500.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16 Laporan	1.020.000.000	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	20%	768.855.448	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	10 Kecamatan di Samarinda	Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	20%	668.855.448	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	20 Kasus	768.855.448	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	20 Kasus	668.855.448	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sebelum Rasionalisasi (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Sesudah Rasionalisasi (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Kecamatan di Samarinda	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	750 Orang	265.225.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Kecamatan di Samarinda	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	750 Orang	265.225.000	Usulan Anggaran di Rasionalisasi
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	106.090.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	14 Laporan	106.090.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	11 Dok	397.540.448	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	11 Dok	297.540.448	

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda yang menjadi prioritas dalam RPJMD Pemerintah Kota Samarinda tahun 2021 – 2026 meliputi :

- a. **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**
 - ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
 - ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- c. **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
 - ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- d. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**
 - ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**
 - ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- f. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Analisis Rencana Kerja Kementerian / Lembaga dan SKPD Pemerintah Kota yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, Sinkronisasi dan Sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Pemerintah Kota terhadap sasaran Rencana Kerja Kementerian / Lembaga dan SKPD Pemerintah Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda terkait dengan Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Dalam Negeri karena Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan SKPD Pemerintah Kota yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Kalimantan Timur.

Korelasi dengan kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan
6. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.



Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, telah ditetapkan 9 (sembilan) Bidang yang menjadi fokus pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yaitu :

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
2. Ekonomi.
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek),
4. Politik.
5. Pertahanan dan Keamanan.
6. Hukum dan Aparatur.
7. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta
9. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Sesuai tugas dan fungsinya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagai bagian dari Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional.

Agar cara pandang jauh kedepan dan apa yang akan dicapai dapat eksis, anti sipasi, dan inovatif maka Pemerintah kota Samarinda menetapkan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya kota Samarinda sebagai kota Pusat Peradaban”.

Dan untuk mewujudkan Visi diatas maka Pemerintah kota Samarinda menetapkan Misi antara lain :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya.
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan.
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.



Berdasarkan Misi tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda mengemban Misi ke 3 (tiga) yaitu “***Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat***” serta mendukung terwujudnya Misi yang ke 5 (lima) yaitu “***Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari***” Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)
2. Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program *smart city* plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (*star up*)

Berdasarkan program prioritas tersebut diatas akan didukung oleh program yang sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda tahun 2021-2026, adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja (RENJA) adalah sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan yang ingin di capai dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan.
2. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik.

3. Peningkatan pemahaman tentang Undang-Undang ORMAS dikalangan organisasi kemasyarakatan.
4. Peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
5. Meningkatkan koordinasi pemantapan stabilitas Keamanan dan Ketertiban.

Sasaran Jangka Menengah RPJMD

Dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sasaran strategi dapat ditetapkan sebagai berikut :

1. Tercapainya Stabilitas keamanan dan ketertiban
2. Meningkatnya pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan
3. Meningkatnya Kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang semakin berkualitas

3.3 Program Dan Kegiatan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada masing-masing sasaran ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai hasil sebagaimana dalam rencana pembangunan, yaitu sebagai berikut:

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- Subkeg. Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
- Subkeg. Pembentukan Paskibraka
- Subkeg. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi



Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Berikut Tabel Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Pendanaan Tahun 2024

Usulan Pendanaan Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda							
Untuk Tahun 2024							
PD : Badan Kesatua Bangsa dan Politik Kota Samarinda							
No.	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2024	
						Target	Rp.
1	2	4	5	6		7	13
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai IKM	Nilai	76,6	8,135,906,856
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP	Nilai	80.4	200,000,000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	100,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	50,000,000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	50,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	Laporan	12	7,287,605,266
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	65	6,215,320,024
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	40	1,022,285,242
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	50,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan	Laporan	12	481,030,840
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12	5,999,100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	200,000,000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Laporan	5	24,651,000

No.	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2024	
						Target	Rp.
1	2	4	5	6		7	13
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	42,999,740
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	12,000,000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	195,381,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12	69,070,000.00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	20,000,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	30,900,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	10	18,170,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan Pemeliharaan	Laporan	12	98,200,750
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	44,706,750
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	12	25,000,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	28,494,000
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			Persentase pemahaman ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dikalangan pelajar dan masyarakat	Persen	29.17%	2,718,270,000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	1000	2,718,270,000

No.	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2024	
						Target	Rp.
1	2	4	5	6		7	13
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1200	506,090,000
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	8	112,180,000
			Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	4	1,800,000,000
			Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	300	200,000,000
			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	Orang	44	100,000,000
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	Persen	100%	53,943,679,550
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Orang	1000	53,943,679,550

No.	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2024	
						Target	Rp.
1	2	4	5	6		7	13
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	10	50,913,097,550
			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	10000	1,517,874,000
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	12	1,512,708,000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	Persen	15.85%	345,000,000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Ormas yang dibina	Ormas	25	345,000,000

No.	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2024	
						Target	Rp.
1	2	4	5	6		7	13
			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	600	220,000,000
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	25	125,000,000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	Persen	40%	1,283,500,000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Laporan	40	1,283,500,000
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	600	263,500,000
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	25	1,020,000,000
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN			Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	Persen	20%	668,855,448

No.	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2024	
						Target	Rp.
1	2	4	5	6		7	13
	FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	Kasus	24	668,855,448
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1000	265,225,000
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	14	106,090,000
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	297,540,448
TOTAL					67,095,211,854		



BAB IV PENUTUP

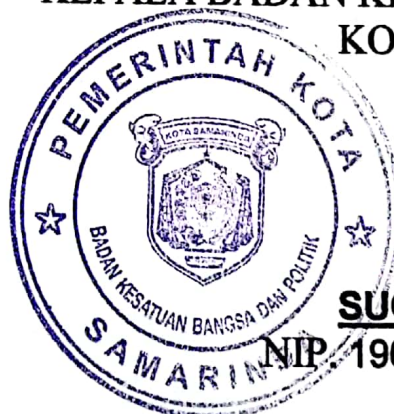
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda untuk mengukur hasil kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda selama tahun 2024.

Dalam menetapkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda bertujuan untuk meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat yang mana memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, dan profesional serta sarana dan prasarana pendukung.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan program, kegiatan ataupun sub kegiatan yang dapat mendukung pembangunan kota Samarinda.

Bilamana program tersebut tercapai maka pelayanan akan meningkat yang berakibat tercapainya Visi dan Misi, Tujuan, dan juga Sasaran yang telah ditentukan.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA,



SUCIPTO, S.Pd,M.Si.

NIP. 19670319 199702 1 003